

FAKTOR PENENTU EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS BENGKULU

Hasrini Verawati, Husaini, Siti Aisyah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu

Abstract

This study aims to examine and obtain empirical evidence about the factors that influence the effectiveness of financial management. The variables to be tested in this study of human resources, the utilization of information technology, systems of internal control, and governance of the effectiveness of financial management.

This research was conducted by giving questionnaires to financial managers the University of Bengkulu that have been based on the ease of obtaining the sample.

The results of this study are quality human resources and internal control system does not affect the effectiveness of financial management. As for the utilization of research results and governance of information technology or a significant positive impact on the effectiveness of the financial management of public service agencies at the University of Bengkulu.

Keywords: human resources, utilization of information technology, systems of internal control, governance, financial management effectiveness

1. Pendahuluan

Dengan status BLU berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 186/KMK.05/2009 sejak tanggal 15 Mei 2009, Universitas Bengkulu (Unib) melaksanakan pengelolaan keuangan berdasarkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU), yang harus senantiasa taat terhadap berbagai kebijakan pengelolaan pendidikan tinggi baik aspek akademik maupun aspek keuangan negara. Hal ini dapat mendorong kinerja Unib ke tingkat yang lebih baik sehingga menjadi salah satu perguruan tinggi yang menjadi pilihan masyarakat. Di masa depan diharapkan mampu menjadikan Unib lebih berkembang, dengan meningkatkan kualitas layanan, sehingga terwujud efektivitas pengelolaan keuangan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan anggaran dan pelaporan sebagai wujud dari transparansi dan akuntabilitas publik.

Berdasarkan hasil pengamatan pendahuluan, fenomena-fenomena yang di sampaikan Hjrulinawa (2011) juga terjadi di Unib, bahwa pengelolaan keuangan badan layanan umum di Unib belum efektif. Penelitian ini mengacu pada penelitian-penelitian terdahulu, dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan badan layanan umum diantaranya tentang sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern serta tata kelola. Penelitian tersebut di lakukan oleh Arsyiati, dkk (2008) hasil penelitiannya menunjukkan kualitas SDM dalam pengelolaan keuangan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja instansi di Unsyiah. Sedangkan hasil penelitian Mariani (2013) menunjukkan bahwa kapasitas SDM,

pemanfaatan teknologi informasi, tidak berpengaruh pada ketepatanwaktuan pelaporan keuangan, sedangkan pengendalian intern berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan. Hasil penelitian Anwar dan Protolo (2011) menunjukkan bahwa faktor-faktor sistem dan personil yang mempengaruhi pengembangan sistem tata kelola keuangan perguruan tinggi swasta, mendukung tercapainya *good university government* (GUG).

Berdasarkan uraian di atas, maka alasan pemilihan topik dalam penelitian ini adalah bahwa penelitian terdahulu sebagian besar lebih menekankan pada faktor sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern dan tata kelola terhadap pengelolaan keuangan. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini diberi judul sebagai berikut: "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pada Universitas Bengkulu".

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi. Menurut Kurniawan (2005:109) efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Selanjutnya menurut Sinaga (2014) yang dimaksud efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Dari pengertian-pengertian dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa jauh program atau kegiatan untuk mencapai hasil dan manfaat yang diharapkan oleh organisasi. ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

2.2. Pengertian Badan Layanan Umum

Menurut Direktorat Jenderal Perbendaharaan (2013) Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU), adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan pola pengelolaan keuangan BLU, fleksibilitas diberikan dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa. BLU juga diberikan kesempatan untuk mempekerjakan tenaga profesional non PNS dalam pemberian imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan kontribusi.

Menurut Lukman (2012) paradigma baru yang mempunyai keterkaitan erat dengan landasan teoritis badan layanan umum yaitu New Public Management (NPM)/Manajemen Publik Baru. New Public Management (NPM) adalah suatu sistem manajemen desentral dengan perangkat-perangkat manajemen baru seperti controlling, benchmarking dan lean management. Sedangkan menurut Osborne dan Gaebler (1995) NPM menekankan bagaimana instansi publik memperlakukan warga masyarakat atau publik sebagai pelanggan (customer) dan NPM dipahami sebagai privatisasi sejauh

mungkin atas aktivitas pemerintah. NPM secara umum dipandang sebagai suatu pendekatan dalam administrasi publik yang menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dalam dunia manajemen bisnis dan disiplin yang lain untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas kinerja pelayanan publik pada birokrasi modern. Tujuan New Public Management adalah untuk mengubah administrasi yang sedemikian rupa sehingga administrasi publik sebagai penyedia jasa bagi masyarakat harus sadar akan tugasnya untuk menghasilkan layanan yang efisien dan efektif, namun tidak berorientasi kepada laba.

2.3. Tujuan dan Asas Badan Layanan Umum

Menurut Direktorat Jenderal Perbendaharaan (2013) badan layanan umum bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat. Selain itu BLU juga bertujuan untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas pelayanan masyarakat serta pengamanan aset negara yang dikelola oleh instansi terkait (penjelasan Pasal 2 PP nomor 23 tahun 2005).

Asas-asas BLU sesuai dengan pasal 3 PP nomor 23 tahun 2005, adalah sebagai berikut :

- BLU beroperasi sebagai unit kerja kementerian negara/pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan.
- BLU merupakan bagian dari perangkat pencapaian tujuan kementerian negara /lembaga/ pemerintah daerah dan karenanya status hukum BLU tidak terpisah dari kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah sebagai instansi induk.
- Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikan kepada BLU dari segi manfaat layanan yang dihasilkan.
- Pejabat yang ditunjuk mengelola BLU bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pemberi layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota.
- Badan layanan umum menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.
- Rencana kerja anggaran, laporan keuangan, kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.
- BLU mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktek bisnis yang sehat.

2.4. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Pengelolaan keuangan BLU juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 66 Tahun 2006, tentang tata cara penyusunan, pengajuan, penetapan, perubahan rencana bisnis dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran badan layanan umum. Berdasarkan PMK No. 66 Tahun 2006 tersebut, maka Tahun 2010 terbitlah Peraturan Rektor Universitas Bengkulu No. 6493 tentang pedoman pelaksanaan pembayaran atas beban anggaran pendapatan badan layanan umum Universitas Bengkulu, yang salah satu isinya mengenai prosedur usulan pelaksanaan kegiatan (UPK), sampai ke prosedur pembayaran dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran kegiatan.

Dari pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengelolaan keuangan badan layanan umum adalah pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat mulai dari tahap perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan dan pertanggung jawaban.

Tahap Perencanaan Anggaran menurut Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2012, fungsi RBA adalah:

1. Dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran satker PK BLU
2. Pedoman pelaksanaan kegiatan satker PK BLU
3. Dokumen yang menggambarkan pencapaian kinerja satker PK BLU
4. Dokumen yang menggambarkan proyeksi keuangan satker PK BLU

PP 74 Tahun 2012 Pasal 11 dalam hal perencanaan dan penganggaran, BLU melakukan beberapa hal berikut ini: 1) BLU mengajukan Rencana Kerja Anggaran (RKA) kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk dibahas sebagai bagian dari Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL), rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), atau Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); 2) RBA disertai dengan usulan standar pelayanan minimum dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan; 3) RBA BLU yang telah disetujui oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala SKPD diajukan kepada Menteri Keuangan/Menteri Keuangan/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), sesuai dengan kewenangannya, sebagai bagian RKA-KL, rencana kerja dan anggaran SKPD, atau Rancangan APBD; dan 4) Menteri Keuangan/PPKD sesuai dengan kewenangannya, mengkaji kembali standar biaya dan anggaran BLU dalam rangka pemrosesan RKA-KL, rencana kerja dan anggaran SKPD, atau Rancangan APBD sebagai bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan APBN/APBD.

Selanjutnya tahap pelaksanaan anggaran, menurut Direktorat Jenderal Perbendaharaan (2013) pada tahap pelaksanaan anggaran, Daftar Isian Pagu Anggaran (DIPA) disusun dengan mengacu pada RBA definitif dan ikhtisar RBA definitif. DIPA BLU merupakan dokumen pelaksanaan anggaran BLU dan menjadi dasar pencairan/penarikan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Sebagai lembaga BLU, Universitas Bengkulu akan memiliki dua sumber pendanaan yaitu APBN dan PNPB. Mekanisme pencairan dana APBN rupiah murni (RM) melalui prosedur pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), sampai dengan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D). Sedangkan dana dari PNPB, menggunakan prosedur SPM Pengesahan dan SP2D Pengesahan kepada KPPN untuk pertanggungjawaban atas pendapatan dan belanja yang terjadi.

Berikutnya tahap pelaporan dan pertanggungjawaban. Laporan keuangan yang disusun meliputi laporan realisasi anggaran/laporan operasional (dapat dalam bentuk laporan aktivitas/laporan surplus defisit), neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, disertai laporan mengenai kinerja. Laporan keuangan BLU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban keuangan kementerian negara/lembaga/SKPD/pemerintah daerah. Penggabungan laporan keuangan BLU pada laporan keuangan kementerian negara/lembaga/SKPD/pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU, sistem akuntansi BLU adalah sebagai berikut: 1) Setiap triwulan BLU wajib membuat laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran/laporan operasional, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja. Laporan tersebut disampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan kepada Menteri Keuangan c.q.

Direktur Jenderal Perbendaharaan, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir; dan 2). Setiap semesteran dan tahunan BLU wajib membuat laporan keuangan secara lengkap yang terdiri dari laporan realisasi anggaran/laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, disertai laporan kinerja. Laporan tersebut disampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Kementerian/Lembaga paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

2.5. Kualitas Sumber Daya Manusia dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan

Menurut Azhar (2007) mendefinisikan “Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut”. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan menurut Arsyianti, dkk (2008) menjelaskan kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai.

Indikator kualitas sumber daya manusia sangat beragam. Indikator kualitas sumber daya manusia yang dikemukakan oleh Danim (1996): 1). Kualitas fisik dan kesehatan adalah memiliki kesehatan yang baik, kesegaran jasmani dan memiliki tingkat kehidupan yang layak dan manusiawi; 2). Kualitas intelektual (pengetahuan dan keterampilan) adalah memiliki kemampuan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi, tingkatan ragam dan kualitas pendidikan serta keterampilan yang relevan dengan memperhatikan dinamika lapangan kerja, baik yang tersedia di tingkat lokal, nasional maupun internasional dan penguasaan bahasa, meliputi bahasa nasional, bahasa ibu (daerah) dan sekurang-kurangnya satu bahasa asing; 3). Kualitas spiritual (kejuangan) adalah taat menjalankan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta toleransi yang tinggi dalam kehidupan beragama; memiliki semangat yang tinggi dan kejuangan yang tangguh, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat; jujur yang dilandasi kesamaan antara pikiran, perkataan dan perbuatan serta tanggung jawab yang dipikulnya; memiliki sikap adaptif dan kritis terhadap pengaruh negative nilai-nilai budaya asing; memiliki semangat kompetisi yang tinggi; memiliki kesadaran hukum yang tinggi serta menyadari hak dan kewajiban asasinya dengan yang ditetapkan dalam UUD 1945.

Kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh faktor pendidikan dan pengalaman kerja. Pendidikan dan pengalaman kerja memberikan arah mengenai sikap atau perilaku seseorang di dalam pekerjaan, dan merupakan proses pengembangan pemahaman mengenai pengetahuan, yang meliputi: pengembangan kemampuan mental dalam pemecahan masalah. Menurut Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) menunjukkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan, dan Arsyianti, dkk (2008) menunjukan bukti empiris bahwa kualitas sumber daya pengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan. Berdasarkan penjelasan diatas, dirumuskan hipotesis:

H1: Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan.

2.6. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan

Teknologi informasi (TI) merupakan seperangkat alat yang membantu pekerjaan dengan melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan teknologi informasi. Teknologi Informasi disini menggabungkan komputerisasi (komputer) dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, ataupun video. Teknologi informasi meliputi komputer (mainframe, mini, micro), perangkat lunak (software), database, jaringan (internet, intranet), electronic commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson et al., 2000).

Menurut Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) pemanfaatan teknologi informasi diukur dengan indikator: a). Perangkat, merupakan indikator untuk menggambarkan kelengkapan yang mendukung terlaksananya penggunaan teknologi, meliputi perangkat lunak, keras dan sistem jaringan, b). Pengelolaan data keuangan merupakan indikator untuk menggambarkan pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan data keuangan secara sistematis dan menyeluruh, c). Perawatan merupakan indikator untuk menggambarkan adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur terhadap perangkat teknologi informasi guna mendukung kelancaran pekerjaan.

Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat. Penelitian yang dilakukan oleh Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) memperoleh bukti empiris bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan. Berdasarkan penjelasan di atas dirumuskan hipotesis :

H2: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan.

2.7. Sistem Pengendalian Intern dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan

Sistem pengendalian intern tersebut berguna untuk mengendalikan kegiatan pemerintahan dalam rangka mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sedangkan menurut COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission, 1994) sistem pengendalian intern merupakan suatu proses yang melibatkan dewan komisaris, manajemen, dan personil lain, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga tujuan berikut ini; Efektivitas dan efisiensi operasi, Keandalan pelaporan keuangan, dan Kepetuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Dilihat dari tujuan tersebut, maka sistem pengendalian intern menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 1). Pengendalian intern akuntansi, dibuat untuk mencegah terjadinya inefisiensi yang tujuannya adalah menjaga kekayaan organisasi dan memeriksa keakuratan data akuntansi. Sebagai contoh, adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab antar unit organisasi; 2). Pengendalian administratif, dibuat untuk mendorong dilakukannya efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Contohnya adalah adanya pemeriksaan laporan untuk mencari penyimpangan yang ada, untuk kemudian diambil tindakan. Prosedur pengendalian ditetapkan untuk menstandarisasi proses kerja, sehingga menjamin tercapainya tujuan organisasi dan mencegah atau mendeteksi terjadinya kesalahan. Adapun prosedur pengendalian tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut: a. Personel yang kompeten, b. Pelimpahan tanggung jawab, c. Pemisahan tanggung jawab untuk kegiatan terkait, dan d. Pemisahan fungsi akuntansi, penyimpanan aset dan operasional.

Pengembangan Satuan Pengawasan Internal (SPI) diperlukan untuk menjamin terlaksananya sistem pengelolaan keuangan yang baik dan dilaksanakannya praktik - praktik akuntansi yang sehat. Satuan pengawasan internal berfungsi untuk melaksanakan audit internal, dan memberikan

rekomendasi perbaikan sistem. Jika SPI dapat menjalankan perannya secara baik, maka good governance pada aspek keuangan dapat dilaksanakan. Hasil penelitian Saleba (2013) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin baik sistem pengendalian intern yang diterapkan maka efektivitas pengelolaan keuangan juga akan semakin baik. Berdasarkan penjelasan di atas dirumuskan hipotesis :

H3: Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan.

2.8. Tata Kelola dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 pasal 5, pola tata kelola merupakan peraturan internal universitas yang menetapkan: a) organisasi dan tata laksana, mencakup struktur organisasi, prosedur kerja, pengelompokan fungsi yang logis, ketersediaan dan pengembangan sumber daya manusia, serta efisiensi biaya; b) akuntabilitas, mencakup kebijakan, mekanisme/prosedur, media pertanggungjawaban, program, kegiatan, dan keuangan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan; c) transparansi, dengan menerapkan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kemudahan memperoleh informasi bagi yang membutuhkan; d) peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan e) kemandirian, yaitu keadaan pengelolaan Universitas tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan kepentingan organisasi maupun peraturan perundang-undangan.

Tata kelola keuangan yang baik merupakan mekanisme pengelolaan keuangan di suatu organisasi yang dimulai sejak perencanaan, penatausahaan keuangan, pelaporan keuangan, audit, dan penghargaan serta hukuman yang dilaksanakan yang mampu mendukung proses akademik, proses sumber daya, dan proses tata kelola secara cepat dan tepat. Hasil penelitian Anwar dan Pratolo (2012) menunjukkan bahwa tata kelola keuangan yang baik berpengaruh positif terhadap Good University Governance. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin baik tata kelola yang diterapkan maka akan terwujudnya tercapainya good university government (GUG). Berdasarkan penjelasan di atas dirumuskan hipotesis :

H4: Tata kelola berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan.

3. Metode Penelitian

3.1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel-variabel yang akan diuji adalah kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi, serta tata kelola (sebagai variabel independen) terhadap efektivitas pengelolaan keuangan (sebagai variabel dependen). Definisi operasional variabel pada penelitian ini dijelaskan sebagai berikut :

Variabel dependen penelitian ini adalah efektivitas pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan yang efektif merupakan mekanisme pengelolaan keuangan di suatu organisasi yang dimulai proses perencanaan, pelaksanaan anggaran, pengawasan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Selanjutnya variabel independen penelitian ini adalah kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, dan tata kelola. Kualitas sumber daya

manusia adalah kemampuan dari staf pengelola keuangan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan latar belakang pendidikan, pelatihan yang diperoleh responden, pemahaman mengenai tugas, dan tanggung jawab terhadap kewajiban untuk mencapai kinerja dan menghasilkan outputs dan outcomes (Arsyianti, dkk 2008). Pemanfaatan teknologi informasi merupakan penggunaan secara optimal dari komputer (mainframe, mini, micro), perangkat lunak (software), database, jaringan (internet), electronic commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson et al, 2000). Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP. No. 60 tahun 2008) dan merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (fraud). (Saleba, 2013). Tata kelola, Pengukuran variabel ini dilakukan dengan mengeksplorasi jawaban responden tentang sejauh mana transparansi, akuntabilitas, responsivitas, keadilan, dan tanggungjawab universitas dalam dalam melakukan pengelolaan keuangan. (Anwar dan Pratolo, 2012)

3.2. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, yang diantar dan diambil sendiri oleh peneliti ke bagian akuntansi/penatausahaan keuangan BLU Perguruan Tinggi pada Satuan Kerja Universitas Bengkulu. Dalam kuisisioner penelitian ini, pertanyaan yang diajukan hanya terdiri dari pertanyaan tertutup yang berjumlah 52 pertanyaan. Teknik yang digunakan untuk mengukur data interval pada kuesioner ini adalah dengan skala likert lima angka penilaian, yaitu skor 1 untuk pernyataan sangat tidak setuju, skor 2 untuk pernyataan tidak setuju, skor 3 untuk pernyataan netral, skor 4 untuk pernyataan setuju, dan skor 5 untuk pernyataan sangat setuju

3.3. Metode Analisis

Dalam pengelolaan data, peneliti menggunakan alat bantu berupa perangkat lunak statistik yang dikenal dengan SPSS. Sedangkan teknik analisis yang digunakan meliputi: uji kualitas data, asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda.

Adapun model regresi berganda yang digunakan untuk menguji hipotesis:

$$EPK = \alpha + \beta_1.KSDM + \beta_2.PTI + \beta_3.SPI + \beta_4.TTB + \epsilon$$

Keterangan :

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

EPK = Efektivitas Pengelolaan keuangan BLU

KSDM = Kualitas Sumber Daya Manusia

PTI = Pemanfaatan Teknologi Informasi

SPI = Sistem Pengendalian Intern

TK = Tata Kelola

ϵ = error

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1. Tingkat Pengembalian Kuesioner

Data penelitian dikumpulkan dengan mengirimkan sebanyak 65 kuisisioner yang diantar langsung ke 65 responden di selingkungan Universitas Bengkulu. Pengiriman kuesioner dilakukan pada Bulan Oktober 2014.

Tabel 4.1 Rincian Tingkat Pengembalian Sampel

Keterangan	Frekuensi	Persentase
Kuesioner yang disebarakan	65	100%
Kuesioner yang tidak direspon	6	9,23%
Kuesioner yang tidak lengkap	3	4,62%
Kuisisioner yang dapat digunakan	56	86,15%

4.2. Deskriptif Responden

Gambaran tentang profil responden yang meliputi jenis kelamin, latar belakang pendidikan, usia, waktu lama bekerja, tingkat pendidikan terakhir dan kursus/diklat/bimtek dalam bidang akuntansi, keuangan dan penyusunan anggaran yang telah di ikuti dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 4.2 sebagai berikut.

Tabel 4.2 Rincian Deskriptif Responden

Keterangan	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin		
- Perempuan	27	48 %
- Laki-laki	29	52 %
Total Responden	56	100%
Pendidikan		
- S3	1	2 %
- S2	8	14 %
- S1	39	70 %
- D3	8	14 %
Total Responden	56	100%
Latar belakang Pendidikan		
- Akuntansi	15	23%
- Non Akuntansi	41	73%
Jumlah Responden	56	100%
Usia		
- 20 -35 thn	20	36 %
- > 35-50 thn	22	39 %
- > 50 – 65 thn	14	25 %
Total Responden	56	100%
Masa kerja		
- 1 – 5 thn	14	25 %
- > 5 – 10 thn	13	23 %
- ≥ 10 – 15 thn	7	13 %
- ≥ 15 – 20 thn	5	9 %
- ≥ 21 Thn	17	30 %
Total Responden	56	100%

Kursus/Diklat/Bimtek dalam bidang akuntansi, keuangan dan penyusunan anggaran yang telah di ikuti:

- Tidak Pernah		
- 1-3 kali	46	82%
- 4-6 kali	10	12%
- 7-9 kali	-	0%
- \geq 10 kali	-	0%
Total Responden	56	100%

4.3. Statistik Deskriptif

Gambaran mengenai variabel-variabel penelitian dalam penelitian ini seperti kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, tata kelola dan efektivitas pengelolaan keuangan disajikan pada Tabel 4.3 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.3 Hasil Analisis Deskriptif Statistik

Variabel	n	Kisaran Teoritis	Mean Teoritis	Kisaran Aktual	Mean Aktual	Std Deviation
Kualitas Sumber Daya Manusia	56	16-80	48	49-76	62.07	5.76
Pemanfaatan Teknologi Informasi	56	8-40	28	12-40	28.96	4.54
Sistem Pengendalian Intern	56	13-65	39	24-63	47.86	6.98
Tata Kelola	56	5-25	15	5-25	18.14	3.35
Efektivitas Pengelolaan Keuangan	56	10-50	30	25-50	35.89	5.87

4.4. Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu instrumen penelitian. Berikut ini hasil pengujian validitas sebagai berikut.

Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas

Variabel	Pearson correlation	Status
Kualitas Sumber Daya Manusia	0,325 *- 0,768 **	Valid
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,554 ** - 0,825 **	Valid
Sistem Pengendalian Intern	0,322 * - 0,777**	Valid
Tata Kelola	0,690 ** - 0, 832 **	Valid
Efektivitas Pengelolaan Keuangan	0,378 ** - 0, 843 **	Valid

** Signifikansi pada level 0,01, * Signifikan pada level 0,05

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas, hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa nilai pearson correlation yaitu korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor tiap konstruksinya signifikan pada level 0,01 atau 0,05 (Ghozali, 2006). Dengan kata lain bahwa semua pernyataan pada masing-masing variabel penelitian memiliki nilai yang valid sehingga semua item pernyataan bisa digunakan.

Selanjutnya hasil pengujian reliabilitas data dilakukan dengan menggunakan alat uji Cronbach's Alpha. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach's alpha lebih besar dari 0,70. Adapun pengujian reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 4.4 di bawah ini.

Tabel 4.4 Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Item Butir Pertanyaan	Cronbach Alpha	Kategori
Kualitas Sumber Daya Manusia (KSDM)	16	0,750	Reliabel
Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI)	8	0,766	Reliabel
Sistem Pengendalian Intern (SPI)	13	0,750	Reliabel
Tata Kelola (TK)	5	0,798	Reliabel
Efektivitas Pengelolaan Keuangan (EFK)	10	0,758	Reliabel

4.5. Hasil Pengujian Hipotesis

Berikut hasil pengujian hipotesis, uji goodness of Fit Model (Uji F), dan koefisien determinasi, disajikan pada Tabel 4.9 berikut ini.

Tabel 4.9 Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Koefisien	Nilai koefisien	t-value	Sig	Kesimpulan
Konstanta	A	17,078	2,173	0,034	
Kualitas Sumber daya Manusia	β_1	-1,053	-1,326	0,190	H ₁ Ditolak
Pemanfaatan Teknologi Informasi	β_2	0,364	2,374	0,021	H ₂ Diterima
Sistem Pengendalian Intern	β_3	0,36	0,266	0,792	H ₃ Ditolak
Tata Kelola	β_4	0,883	3,172	0,003	H ₄ Diterima
Adj R ² = 0.38 atau 38 %					
Sig.F = 0,000					
F = 9,411					

Uji Goodness of Fit Model (Uji F) digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksirkan nilai aktual. Berdasarkan Tabel 4.9 hasil Uji Goodness of Fit Model menunjukkan nilai F 9,411 dengan signifikansi 0,000 (<0,05). Hal ini menunjukkan model regresi adalah fit bahwa secara keseluruhan terdapat hubungan variabel independen terhadap variabel dependen. Sementara koefisien determinasi (R²) tujuannya untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006). Berdasarkan Tabel 4.9 di atas, nilai adjusted R² sebesar 0,38, hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen (efektivitas pengelolaan keuangan) sebesar 38 % dan sisanya sebesar 62 % dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model.

Selanjutnya uji statistik t dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05 ($\alpha=5\%$). Berdasarkan Tabel 4.9, menunjukkan bahwa hasil hipotesis kualitas sumber daya manusia (H1) dengan nilai koefisien β_1 sebesar -1,053, t-value sebesar -1,326 dan tingkat signifikan sebesar 0,190 atau lebih besar dari 0,05 yang berarti kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan, sehingga hipotesis pertama ditolak. Hasil hipotesis pemanfaatan teknologi informasi (H2) dengan nilai koefisien β_2 sebesar 0,364, t-value sebesar 2,374 dan tingkat signifikan sebesar 0,021 atau lebih kecil dari 0,05 yang berarti pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan, sehingga hipotesis kedua diterima.

Hasil hipotesis sistem pengendalian intern (H3), dengan nilai koefisien β_3 sebesar 0,36, t-value sebesar 0,266 dan tingkat signifikan 0,792 atau lebih besar dari 0,05 yang berarti sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan, sehingga hipotesis ketiga ditolak. Sedangkan hipotesis tata kelola (H4), dengan nilai koefisien β_4 sebesar 0,883, t-value sebesar 3,172 dan tingkat signifikan sebesar 0,003 atau lebih kecil dari 0,05, yang

berarti tata kelola berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan, sehingga hipotesis keempat diterima.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan badan layanan umum. Hal ini berarti bahwa kualitas sumber daya manusia bukan faktor penentu dalam menjelaskan keefektifitasan pengelolaan keuangan badan layanan umum di Universitas Bengkulu. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan badan layanan umum. Semakin baik dalam memanfaatkan teknologi informasi yang diterapkan, maka semakin baik efektivitas pengelolaan keuangan badan layanan umum di Universitas Bengkulu. Sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan. Hal ini berarti bahwa sistem pengendalian intern bukan faktor penentu dalam menjelaskan keefektifitasan pengelolaan keuangan badan layanan umum di Universitas Bengkulu. Tata kelola berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan badan layanan umum di Universitas Bengkulu. Hal ini menunjukkan bahwa dengan tata kelola yang baik maka semakin efektif dalam pengelolaan keuangan badan layanan umum di Universitas Bengkulu.

Penelitian ini dapat memberikan masukan yang penting bagi para pengelola keuangan badan layanan umum di Universitas Bengkulu, bahwa faktor pemanfaatan teknologi informasi dan tata kelola mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan badan layanan umum di Universitas Bengkulu. Sedangkan dari hasil hipotesis yang menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern bukan faktor penentu yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan badan layanan umum di Universitas Bengkulu, tetapi alangkah baiknya Pimpinan juga dapat memperhatikan bahwa dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam hal pemberian pelatihan-pelatihan terkait pengelolaan keuangan, dan pengendalian intern perlu di tingkatkan baik dari segi pemisahan wewenang secara tepat dalam suatu kegiatan, serta pengawasan internal dimasing-masing unit kerja selingkungan Universitas Bengkulu diperlukan, sehingga dapat memberikan jaminan terlaksananya sistem pengelolaan keuangan yang baik dengan dilaksanakan praktik-praktik akuntansi yang sehat.

References

- Anwar dan Protolo, 2012. Penerapan Model Tata Kelola Keuangan Perguruan Tinggi Yang Baik Untuk Mewujudkan Good University Governance (Studi Pada PTM se Indonesia)
- Arsyati, dkk, 2008. Pengaruh Kualitas SDM Dalam Pengelolaan Keuangan Terhadap Kualitas Pertanggungjawaban Keuangan PNBK Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Instansi Pada Universitas Syiah Kuala. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi* Vol. 1, Hal 29-49.
- Azhar. 2007. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Permendagri No. 13 pada Pemerintah Kota Banda Aceh. Tesis. Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.
- COSO, 1994. *Internal Control Integrated Framework*. New York: AIGPA's Publication Division
- Danim, Sudarwan, 1995. *Transformasi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2013. *Manual Pengelolaan Satker BLU Bidang Layanan Pendidikan*.
- Dungo, 2013. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Efektivitas Pengelolan Keuangan Daerah (Studi Kasus Univeristas Mulawarman)*.

- Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Aplikasi Multivarite dengan SPSS. Cetakan keempat. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang
- Hasan, M. Iqbal. 2005. Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hjrinulnawa, 2011. Transparansi Dan Akuntabilitas Sistem Keuangan Universitas Negeri Makassar Menyosong Badan Layanan Umum (BLU). Digilib-392-makalah
- Sinaga, 2014. Defenisi Pengertian Efektivitas (<http://blog.wordpress.com/>diakses tanggal 18 September 2014 pukul 09.00 WIB
- Keputusan Menteri Keuangan No.119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuaan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum
- Keputusan Menteri Keuangan No. 186/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Bengkulu Pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah Yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- Kurniawan, Agung. 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Lukman Mediya, 2012. Badan Layanan Umum Dari Birokrasi Menuju Korporasi. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Mariani, 2013. Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keandalan dan Timeliness Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi.
- Munandar, 2001. Budgeting Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerjadan Pengawasan Kerja. Yogyakarta:BPFE.
- Osborne, David and Ted Gaebler, 1995, Reinventing Government: How The Entrepreneurial Spirit Is Tranforming The Public Sector, New York Penguin Books Inc
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66.PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan RBA serta DIPA BLU
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum.
- Peraturan Rektor Universitas Bengkulu No. 6493/H.30/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu
- Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- Saleba, (2014). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolan Keuangan Daerah (Studi Kasus Univeristas Hasanuddin Makasar).
- Sekaran, Uma, 2003. Research Methods For Business: A Skill-Building Approach. John Wiley and Sons Inc, New York.
- Steers, M Richard, 1985. Efektivitas Organisasi. Jakarta: Erlangga
- Sugito Yogi, 2008. Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya; Malang
- Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaaraan Negara
- Wilkinson, W. Joseph, Michael J. Cerullo, Vasant Raval, & Bernard Wong-On-Wing. 2000. Accounting Information Systems: Essential Concepts and Applications. Fourth Edition. John Wiley and Sons. Inc
- Winidyaningrum, C., dan Rahmawati. 2010. Pengaruh sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening pengendalian intern akuntansi. Simposium Nasional Akuntansi XIII, Purwokerto, 13-15 Oktober.

Halaman ini sengaja dikosongkan